

Trafficking In Person

KEMAMPUAN POLRI MENGENDUS MODUS BARU

Berbagai pengungkapan kasus perdagangan manusia atau trafficking in person (TIP), diungkap jajaran kepolisian, baik di tingkat Polda maupun mabes Polri. Pelaku baik dari warga negara Indonesia (WNI) dan WNA, ditangkap.

BUKAN hanya itu, Polri juga membongkar sindikat perdagangan manusia yang diduga melibatkan sindikasi internasional. Keseriusan Polri mengungkap perdagangan manusia ini, ternyata menjadi perhatian kepolisian internasional.

Bahkan Kepolisian Federal Australia (AFP) memberikan apresiasi tersendiri atas kemampuan Polri itu dengan memberikan piagam penghargaan.

Piagam penghargaan yang diserahkan Deputy Commissioner APF, John Lawler, kepada Wakapolri, Komjen Pol Makbul Padmanagara, di Mabes Polri, belum lama ini, merupakan penghargaan atas pengungkapan perdagangan manusia dari Sri Lanka ke Australia yang dikendalikan dari Jakarta.

AFP memberikan penghargaan kepada Polri karena berhasil menangkap tiga WN Sri Lanka yang mengendalikan perdagangan manusia dari Jakarta, padahal mereka sudah beraksi selama sembilan tahun.

Polri dalam mengungkap kasus ini banyak menerima data dari AFP sebab kasus ini bermula dari Australia ketika menangkap satu kapal



FOTO: JIJEVA HARTINI

yang berisi 83 manusia untuk diselundupkan ke Australia.

Para tersangka ini selain memperdagangkan manusia juga melakukan pembobolan kartu kredit hingga ratusan kali, membuat dokumen palsu dan melanggar keimigrasian. Ketiga tersangka yang kini telah diserahkan ke jaksa penuntut umum itu adalah Babu, Mohan dan Bram.

Wakapolri Makbul Padmanagara mengatakan, pemberantasan kejahatan perdagangan manusia membutuhkan kerja sama kepolisian beberapa negara termasuk AFP dengan Polri. "Kerja sama dengan Australia tidak hanya soal perdagangan manusia tetapi sudah menyangkut narkoba, kejahatan ekonomi dan terorisme," katanya.

Praktek perdagangan orang di Indonesia, saat ini semakin mengkhawatirkan dan terjadi peningkatan. Angka trafficking meningkat yakni rata-rata mencapai sekitar

50.000 orang per tahun.

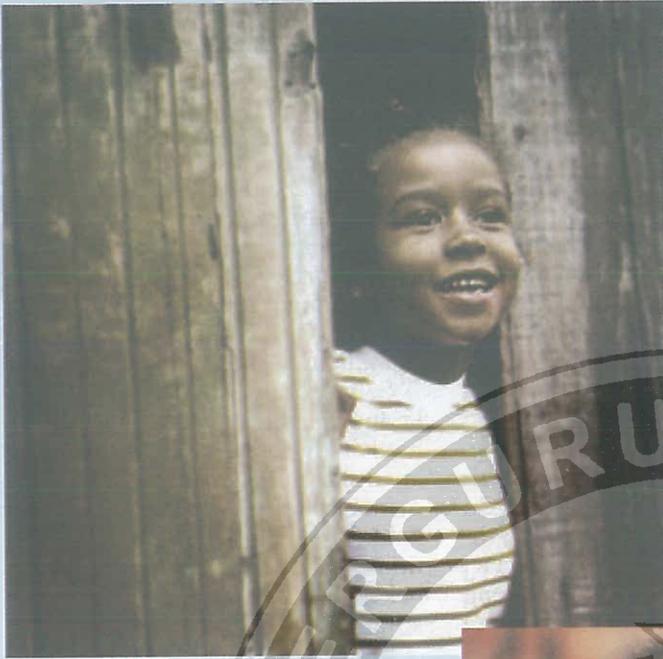
Bahkan, kata Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan PDE Pemprov Sulsel, Amien Achmad, Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita terbesar di Asia Tenggara. Jumlah tersebut akan semakin bertambah jika tidak ada antisipasi pencegahan baik dari pemerintah maupun masyarakat.

"Jadi tidak heran kalau akhir-akhir ini kita banyak mendapat sorotan tajam dunia internasional, termasuk negara-negara donor yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada pemerintah Indonesia apabila praktek trafficking tidak dapat dihentikan," katanya.

Achmad menambahkan, salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang adalah ambruknya sistem ekonomi lokal sehingga banyak anak, gadis dan perempuan yang dieksplotasi di tempat-tempat kerja global untuk mencari pendapatan.

Situasi seperti ini semakin merajalela di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi yang parah akibat lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri tidak sesuai dengan pilihan mereka untuk tetap tinggal di daerahnya.

"Praktek trafficking tiap tahun meningkat termasuk di Sulawesi Selatan, sementara yang banyak berperan adalah orang-orang dekat dengan korban seperti orang tua dan sanak saudara sehingga agak sulit pencegahannya," katanya, seraya menambahkan bahwa perdagangan anak juga bisa dilakukan agen penerima tenaga kerja Indonesia.



Selain itu, perdagangan orang juga dipicu rendahnya pendidikan keluarga, kemiskinan dan gaya hidup yang konsumtif termasuk perlindungan hukum bagi anak yang masih lemah.

"Ini ditandai dengan belum efektifnya penerapan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak dalam berbagai kasus kejahatan terhadap anak," katanya.

Amien menambahkan, tindakan kejahatan perdagangan anak bukan hanya merusak nilai-nilai hak asasi manusia tetapi juga merendahkan harkat dan martabat manusia. Karena itu, memperdagangkan anak yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Karena itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta, Sri Marmining Djati, meminta agar perempuan pencari kerja harus mewaspadaai penawaran pelatihan kerja karena saat ini ditinggalkan banyak kasus trafficking yang menggunakan modus pelatihan kerja untuk menjerat calon korban.

"Trafficking yang merupakan bentuk perbudakan modern saat ini

semakin berkembang dengan menggunakan modus pelatihan kerja dan berhasil menjerat korban kaum terpelajar," katanya.

Menurut dia, dari sejumlah kasus, mayoritas korban berasal dari masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi dengan kondisi ekonomi kurang mampu.



"Saat ini pelaku trafficking sudah demikian cerdasnya untuk menjerat korban dengan berkedok pelatihan kerja, sehingga mereka yang terpelajar tidak luput menjadi korban. Untuk itu masyarakat harus hati-hati terhadap penawaran semacam itu apalagi jika lembaganya tidak kredibel," katanya.

Menurut dia, pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi diharapkan dapat mengantisipasi tindak kejahatan perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

Sebuah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di Makassar bahkan berani menyebutkan, enam dari 23 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yakni kabupaten Bone, Sinjai, Sidrap, Wajo, Tanatoraja dan Luwu

diduga sebagai sumber perdagangan orang dengan daerah transit Makassar dan Parepare.

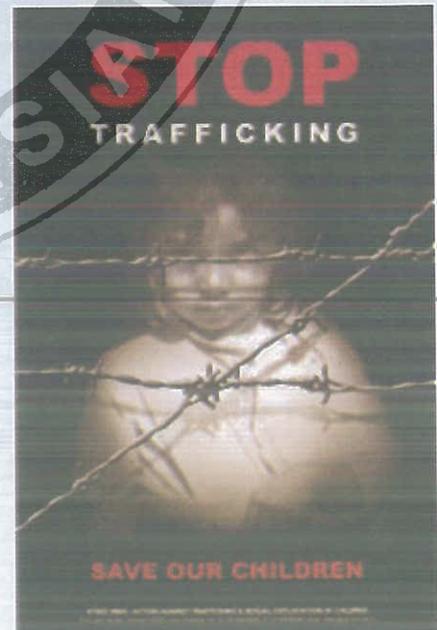
Menurut Rosmiaty Azis, Makassar dan Parepare yang memiliki pelabuhan tergiat di Sulsel merupakan daerah penerima trafficking sekaligus melancarkan upaya perdagangan orang secara ilegal.

Ia menambahkan, pada 2005 tercatat 17 korban trafficking yang dipulangkan dari Nunukan, Kaltim, ke Sulsel melalui pelabuhan Parepare.

Agar tidak terjadi hal serupa di masa datang, diperlukan peran masyarakat dan instansi terkait untuk melakukan pencegahan dengan memberikan pengertian kepada warga agar tidak 'tergoda' dengan janji mendapatkan upah lebih besar yang pada akhirnya mereka mengalami penderitaan di negara tempat bekerja.

"Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperdagangkan secara ilegal sebab perbuatan seperti itu dilarang sesuai pasal 20 UU No 39/1999 tentang HAM," tandasnya.

Ini sesuai komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk Keppres No 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak-anak (RAN-P3A) serta UU pemberantasan tindak pidana perdagang-





an orang No 21/2007.

Kompleksitas permasalahan dalam pengungkapan trafficking ini, mengilhami Mabes Polri bersama departemen terkait membentuk satuan tugas (satgas) anti trafficking in person. Secara umum satgas akan melakukan penindakan dan pencegahan terjadinya penjualan manusia ke luar negeri.

"Tugas Polri lebih cenderung ke penindakan, yang di dalamnya mencakup penyelidikan dan penyidikan," kata Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko.

Menurutnya, Polri juga terlibat dalam tindakan pencegah terjadinya TIP, seperti sosialisasi, advokasi dan rehabilitasi.

Satgas ini, lanjut Bambang Kuncoko, terdiri dari Deplu, Depdagri, Dephub, Depdiknas, Menteri Nega-

ra Pemberdayaan Perempuan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, dan Mabes Polri.

Ia menambahkan, TIP biasanya terjadi di dua wilayah, yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan di luar negeri, Mabes Polri memberdayakan liaison officer (LO) atau perwakilan Polri yang berada di luar negeri. "Pada proses selanjutnya, LO Polri akan bekerjasama dengan Kedubes RI di negara bersangkutan," katanya.

Satgas TIP telah melakukan penyelidikan keberadaan TIP di Kwangjo, Sensen (Cina), dan Tebedu (Malaysia). Karena kota-kota ini diperkirakan banyak terdapat TKI ilegal yang akan dikirim ke Hong Kong, Singapura dan negara-negara di Timur Tengah.

Saat ini, lanjutnya, satgas TIP juga telah melakukan tindakan terhadap beberapa perusahaan Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum.

"Dengan tindakan yang telah dan akan dilakukan Satgas TIP, diharapkan TIP bisa dieliminir dan

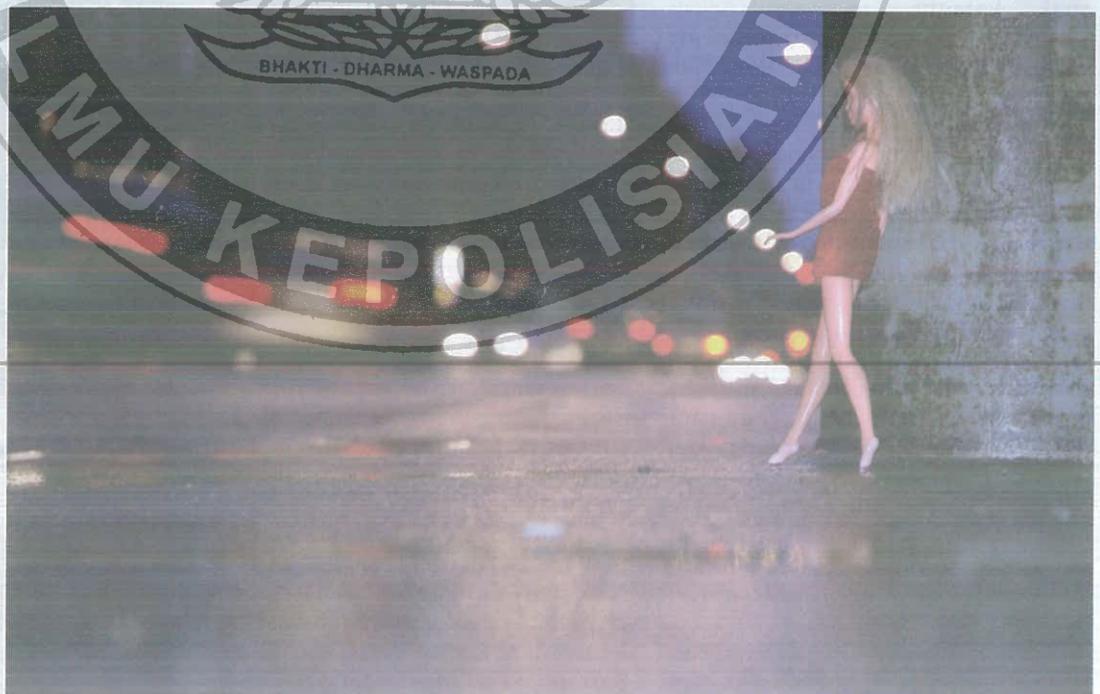
pencegahan bisa dilakukan lebih awal," kata Bambang.

Ia menambahkan, Satgas TIP bekerja berdasarkan Inpres No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Unit TIP Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Pol Anton Charliyan, mengungkapkan, pencegahan terjadinya TIP sebenarnya bisa dilakukan sejak awal.

Setiap orang yang ingin bekerja ke luar negeri juga harus memperhatikan tiga aspek, yaitu kelengkapan dokumen, skill dan kesiapan mental yang tidak spekulatif. "Jadi kalau mau bekerja ke luar negeri, tidak boleh spekulasi. Harus jelas bekerja di mana dan menjadi apa," katanya.

Jajaran Bareskrim Polri, lanjut Anton Charliyan, beberapa bulan terakhir berhasil mengungkap jaringan TIP. Dari kasus-kasus yang diungkap, pelaku menyamarkan aksi mereka dengan memberikan kesempatan pendidikan atau magang bekerja di luar negeri. Selain itu, ada beberapa PJTKI ilegal dan sengaja menyelundupkan calon TKI ke luar negeri. [AR-008]





**Berbahaya kalau
hal seperti ini
lakukan !!!**

